

SABTU PON, 5 DESEMBER 2015
(22 SAPAR 1949)

Analisis KR

Titik Kritis Pilkada

Dr Suranto

PESTA demokrasi lokal serentak di Indonesia tinggal hitungan hari. Tahapan pelaksanaan Pilkada pun sudah memasuki masa-masa kritis menuju kulminasi pada 9 Desember 2015. Fakta empiris menunjukkan ada beberapa daerah yang suasananya terkesan *adhem ayem* dan kelihatan kurang *greget* menyambut Pilkada. Namun di daerah-daerah lain tampak kondisi yang sangat dinamis dan menunjukkan kontestasi panas.

Setidaknya terdapat empat titik kritis dalam pelaksanaan Pilkada serentak mendatang. *Pertama*, tahap pelaksanaan kampanye model terbuka. Belajar dari pelaksanaan Pemilu-pemilu sebelumnya, KPU membuat regulasi pembatasan frekuensi kampanye model terbuka untuk Pilkada serentak ini. Kebijakan pembatasan ini cukup tepat mengurangi kuantitas konflik yang mungkin terjadi mengingat kampanye model terbuka yang bermuara pada pengepungan massa, potensial menyebabkan tindakan anarkis dan bentrok antarpendingung calon.

Namun yang perlu diwaspadai adalah kualitas dan intensitas konflik antarpendingung yang akan meningkat seiring dengan

* Bersambung hal 8 kol 1

Titik Kritis

terbatasnya frekuensi dan durasi kampanye terbuka ini. Massa pendukung sangat menunggu momentum ini untuk melampiaskan gejolak partisipasinya yang dikekang. Apabila hal ini tidak diwaspadai, bentrok antarmassa pendukung maupun antarpendingung dengan sekelompok warga yang terganggu akan sangat mungkin terjadi. Peran penegak hukum dan penyelenggara Pemilu sangat diharapkan dalam fase ini.

Kedua adalah tahap distribusi dan pengamanan logistik Pilkada. Logistik merupakan kunci utama sukses tidaknya pelaksanaan Pilkada, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang sempurna. Dari aspek kuantitas, logistik harus tepat sesuai alokasi kebutuhan per-PPK, PPS dan KPPS. Sementara dari aspek kualitas harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan regulasi. Demikian juga distribusinya harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang berlaku, serta aspek pengamanannya baik pada saat distribusi maupun pra dan pascapelaksanaan Pilkada harus dijaga petugas yang netral. Pengelolaan logistik ini seharusnya menerapkan prinsip tanpa kesalahan.

Titik kritis *ketiga* adalah tahap masa tenang sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada hari H. Sudah menjadi rahasia umum, jika pada masa hari tenang ini sering digunakan calon dan tim suksesnya untuk menggalang dukungan pemilih. Adapun modusnya bisa berupa mobilisasi jemput bola, intimidasi hingga praktik *money politics*. Praktik politik uang atau yang dalam ranah publik dinamakan *bitingan*, akan sangat potensial terjadi. Seperti diketahui, pada Pilkada kali ini paslon tidak harus mengeluarkan biaya terkait pembuatan dan pemasangan bahan dan alat peraga kampanye karena berdasarkan regulasi harus ditanggung KPU, sehingga modal yang seharusnya

dialokasikan untuk kampanye masih tersisa. Hal inilah yang potensial dialihkan untuk praktik politik uang. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme pengawasan yang intensif dari pengawas Pemilu dan masyarakat. Di samping itu, juga dibutuhkan netralitas penyelenggara Pemilu dan aparat birokrasi dan desa pada tahap ini.

Titik kritis *keempat* adalah tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Berdasarkan regulasi, proses rekapitulasi hasil dilakukan di tingkat PPK (kecamatan) yang bisa dilakukan dengan rentang waktu tiga hari pascapemungutan suara. Keberadaan kotak suara beserta isinya selama menunggu proses rekap di kantor kecamatan ini yang cukup rentan 'dikerjai' oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu pengawasan intensif oleh Panwaslu, pemantau maupun masyarakat dalam tahap ini diperlukan. Di samping mekanisme kontrol masing-masing timses terhadap hasil pemungutan suara per-TPS guna memperlancar dan menjaga objektivitas proses rekap di kecamatan yang akan lebih rawan dibanding proses rekap di KPU Kabupaten/Kota/Provinsi.

Titik krusial terakhir adalah tahapan penetapan hasil Pilkada yang dilakukan di KPU yang biasanya rawan gugatan dari pasangan yang kalah berkontestasi. Bentuknya bisa berupa ketidakhadiran atau keengganan untuk menandatangani berita acara sampai dengan gugatan hasil Pilkada.

Peta titik-titik rawan ini harus diketahui masyarakat dan harus diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu menjelang Pilkada serentak tahap pertama. Kita berharap *pilot project* Pilkada ini berjalan Luberjurdil sesuai slogan Pemilu selama ini.

(Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY)-d

Sambungan hal 1